



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Pengarah : R. Wiwin Istanti | Penanggung Jawab: Heru Kutanto | Ketua Tim: R. Irwandha Triyono | Editor: Arni Widijamity | Desain Grafis: Surini | Anggota: Bagus Jatmiko | Isti Wahjuli | Nunuk Hindriastutik | Meri Nurami | Indah Sridiyastuti | Sukarsiningsih | Ali Purboyo | Albertin Upa | Praptiningdyah N. I

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN**
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	1
C. Indikator Kesejahteraan.....	2
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	5
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	12
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah.....	16
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2016.....	17
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN	18
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	18
B. Pendapatan Konsolidasian	18
C. Belanja Konsolidasian	21
V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	24
A. Prospek Ekonomi Jatim Membaik, Kondusif untuk Investasi	24
B. Jatah Dana Desa Berkurang	24

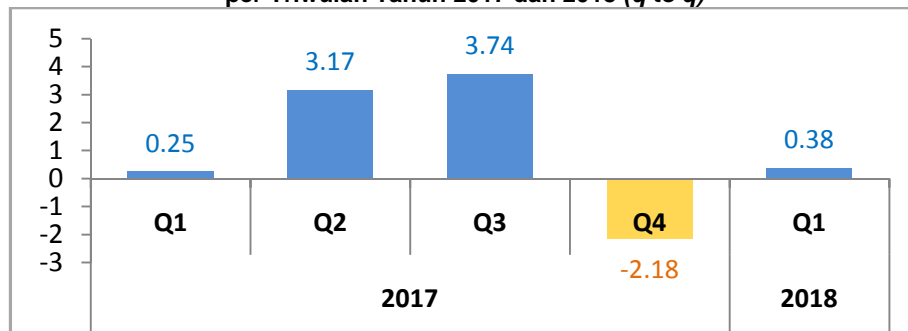
BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Bruto

Perekonomian Jawa Timur triwulan I tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp523,82 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp376,09 triliun. Secara *q to q* perekonomian Jawa Timur tumbuh 0,38 persen. Dari sisi produksi, beberapa lapangan usaha tumbuh positif didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 16,93 persen, diikuti Industri Pengolahan 1,46 persen, dan Jasa Perusahaan 1,28 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Ekspor Luar Negeri sebesar 3,99 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 0,44 persen dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,38 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur per Triwulan Tahun 2017 dan 2018 (*q to q*)

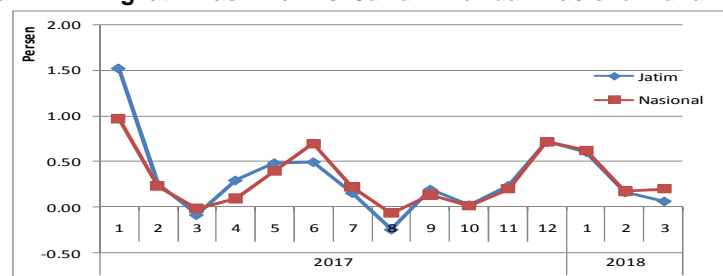


Sumber: BPS

B. Inflasi

Inflasi Jawa Timur di Tahun 2018 diperkirakan akan berada pada batas aman mendekati batas sasaran inflasi nasional, yakni di kisaran $3,5 \pm 1$ persen. Hampir seluruh kelompok pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi penyumbang angka inflasi di Jawa Timur tahun 2018.

Grafik 1.2 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018



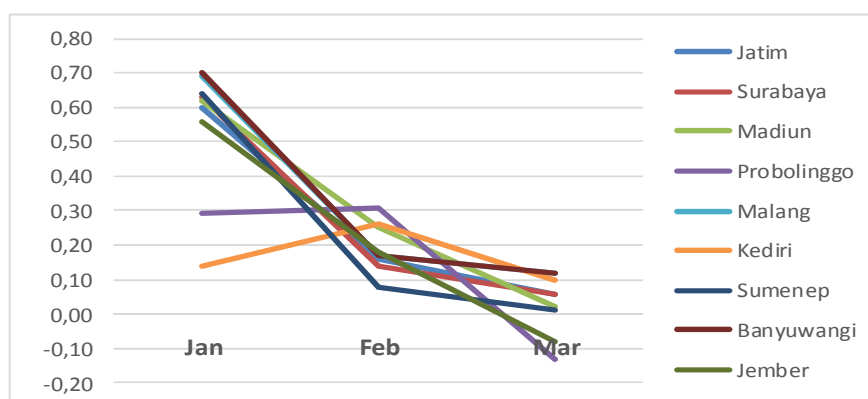
Sumber: BPS

Pada bulan Januari 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Inflasi terjadi di seluruh kota IHK di Jawa Timur. Kota Banyuwangi memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,7 persen sedangkan inflasi terendah adalah di Kota Kediri sebesar 0,14 persen.

Pada bulan Februari 2018 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,16persen. Inflasi terjadi di seluruh kota IHK di Jawa Timur. Kota Probolinggomemiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,31 persen sedangkan inflasi terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 0,08 persen.

Inflasi di Jawa Timur pada bulan Maret2018 adalah sebesar 0,06 persen. Inflasi terjadi di seluruh kota IHK di Jawa Timur. Kota Malang dan Banyuwangi memiliki angka inflasi paling tinggi yaitu 0,12persen sedangkan deflasi terjadi di Kota Pobolinggo dan Jember yaitu sebesar 0,13 dan 0,08 persen.

Grafik 1.3 Tingkat Inflasi 8 Kota dan Jawa Timur Tahun 2018

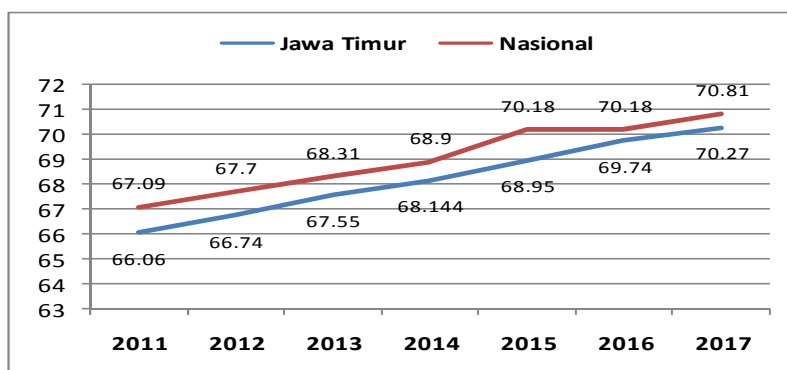


Sumber: BPS

C. Indikator Kesejahteraan

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

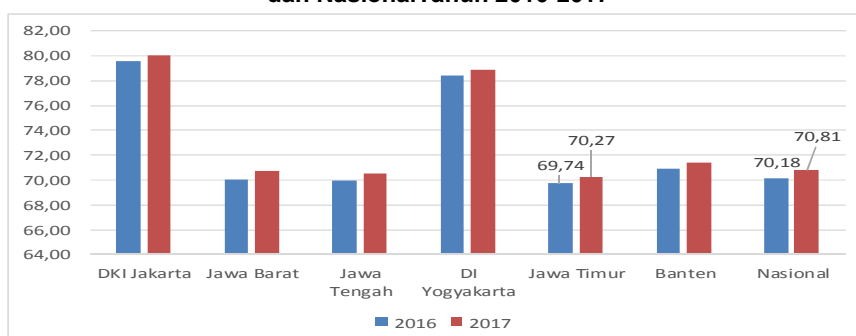
Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur Tahun 2011-2017



Sumber: BPS Jatim

Tingkat IPM di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2011-2017. Selama kurun waktu antara tahun 2011 s.d. 2017 tersebut, IPM di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, meskipun masih dibawah IPM nasional pada kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2011 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”.

Grafik 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Semua Provinsi di Jawa dan Nasional Tahun 2016-2017



Sumber : BPS

IPM di Jawa Timur pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebagaimana juga dialami oleh semua provinsi di pulau Jawa. Namun demikian, IPM di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan IPM Nasional dan provinsi lain di pulau Jawa.

Tabel 1.1 Kuadran Indeks Pembangunan Manusia Semua Kota di Jawa Timur dan Provinsi Tahun 2017

<p>SEDANG 60 < IPM < 70</p> <p>- Sampang [59.90]</p>	<p>SANGAT TINGGI 80 < IPM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Surabaya [81.07] • Kota Malang [80.65] • Kota Madiun [66.73]
<p>RENDAH IPM < 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi [69.64] • Blitar [69.33] • Ponorogo [69.29] • Ngawi [69.27] • Malang [68.47] • Trenggalek [68.10] • Bojonegoro [67.28] • Tuban [66.77] • Pasuruan [66.69] • Pacitan [66.51] • Situbondo [65.68] • Jember [64.96] • Pamekasan [64.93] • Bondowoso [64.75] • Probolinggo [64.28] 	<p>TINGGI 70 < IPM < 80</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidoarjo [78.70] • Kota Kediri [77.13] • Kota Blitar [77.10] • Kota Mojokerto [76.77] • Gresik [74.84] • Kota Pasuruan [74.39] • Kota Batu [74.26] • Mojokerto [72.36] • Kota Probolinggo [72.09] • Tulungagung [71.24] • Lamongan [71.11] • Jombang [70.88] • Nganjuk [70.69] • Kediri [70.47] • Madiun [70.27]

Sumber : BPS

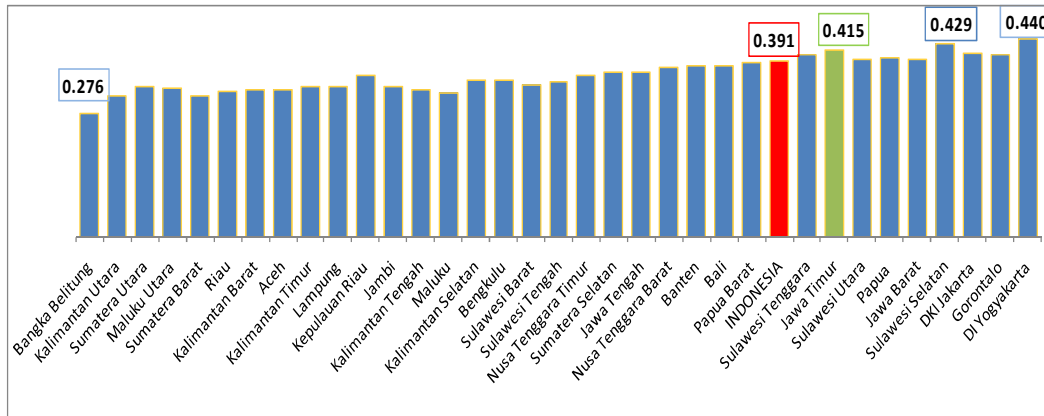
Terdapat tiga kota di Jawa Timur dengan kategori IPM yang sangat tinggi ($IPM \geq 80$), enam belas Kota/Kabupaten dengan kategori IPM Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), delapan belas dengan kategori IPM sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan satu kategori IPM rendah ($IPM < 60$).

Hal ini menjadi tugas Pemerintah Daerah di Jawa Timur meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, karena masih ada satu wilayah di Jawa Timur (Sampang) yang berkategori IPM “rendah”.

2. Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

**Grafik 1.6 Gini Rasio Semua Provinsi dan Nasional
September 2017**



Sumber: BPS

Gini Ratio di Provinsi Jawa Timur pada September 2017 tercatat sebesar 0,415. Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia dan gini rasio nasional pada bulan yang sama, yaitu 0,391. Hanya Provinsi Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta yang memiliki angka Gini Rasio lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Timur, masing-masing 0,429 dan 0,440.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan pelaksanaan APBN lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jawa Timur
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A PENDAPATAN NEGARA	180.145,74	21.960,13	195.596,45	22.864,64
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	180.145,74	21.960,13	195.596,45	22.864,64
1. Penerimaan Pajak	176.207,79	20.516,14	187.276,81	21.077,35
2. PNBP	3.937,95	1.443,99	8.319,65	1.787,29
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	119.477,87	25.598,30	119.368,44	24.891,25
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	38.570,29	5.687,81	44.375,07	5.981,94
1. Belanja Pegawai	19.375,98	3.431,80	19.926,67	3.465,06
2. Belanja Barang	11.011,75	1.860,68	16.310,64	2.074,71
3. Belanja Modal	7.942,01	379,77	8.088,19	433,16
4. Belanja Bantuan Sosial	240,55	15,56	49,57	9,01
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	80.907,59	19.910,49	74.993,37	18.909,31
1. Transfer Ke Daerah	74.568,03	19.910,49	68.649,76	17.864,07
a. Dana Perimbangan	73.886,05	19.516,65	67.654,51	17.564,19
1) Dana Alokasi Umum	39.827,73	13.383,48	39.914,88	13.269,60
2) Dana Bagi Hasil	14.269,22	2.261,57	8.302,61	1.686,11
3) Dana Alokasi Khusus	19.789,10	3.871,60	19.437,02	2.608,48
i) DAK Fisik	5.006,53	-	3.779,00	-
ii) DAK Non Fisik	14.782,57	3.871,60	15.658,02	2.608,48
b. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	681,98	393,84	995,25	299,88
2. Dana Desa	6.339,56	-	6.343,61	1.045,24
C. SURPLUS/DEFISIT	60.667,87	(3.638,17)	76.228,01	(2.026,60)

Sumber: SPAN

Anggaran Pendapatan Negara lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mengalami peningkatan 8,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan negara s.d. triwulan I-2018 sebesar Rp22,86 triliun meningkat sebesar Rp0,90 triliun. Pagu Belanja Negara tahun 2018 sebesar Rp119,37 triliun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp 0,11 triliun. Realisasi belanja s.d. triwulan I-2018 sebesar Rp 24,89 triliun, menurun dibandingkan belanja negara pada triwulan I-2017 yaitu Rp 25,60 triliun. Defisit APBN sebesar Rp 2,02 triliun.

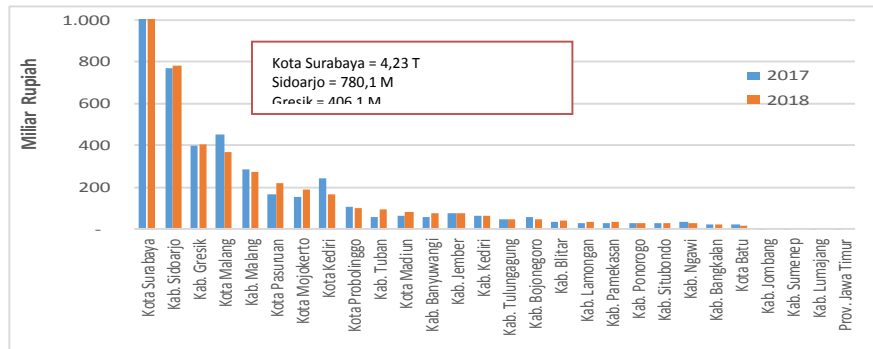
A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan PPh di seluruh Kota/Kabupaten lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. triwulan I-2018 sebesar Rp 7,45 triliun, meningkat 4,2 persen bila dibandingkan s.d. triwulan I-2017 sebesar 7,15 triliun. Kenaikan terbesar PPh di Kota Surabaya sebesar Rp 4,23 triliun, Kabupaten Sidoarjo Rp 0,78 triliun dan Kabupaten Gresik Rp 0,41 triliun.

Grafik 2.1 RealisasiPenerimaan PPh Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalamJuta Rupiah)

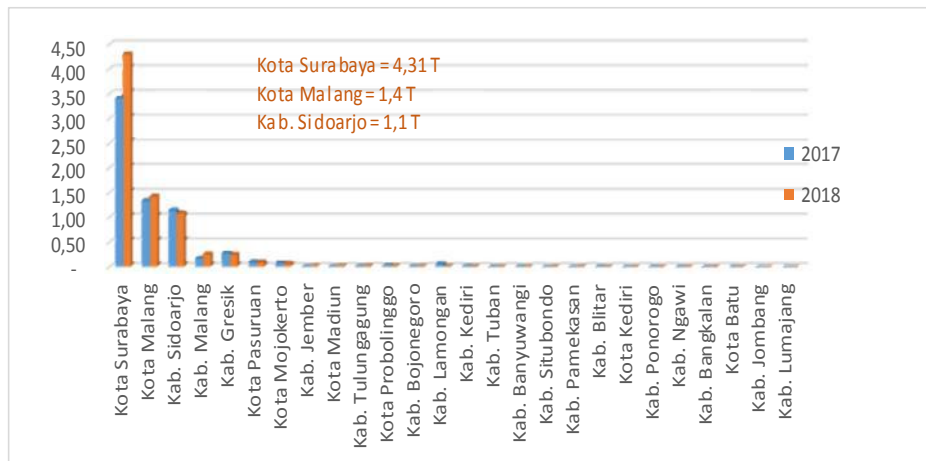


Sumber: SPAN

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN per kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2 RealisasiPenerimaan PPNKabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (dalamTriliun Rupiah)



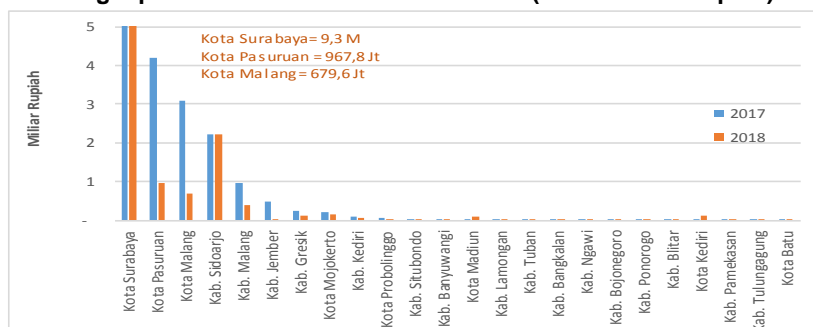
Sumber: SPAN

Penerimaan PPN s.d. triwulan I-2018 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp7,93 triliun. Penerimaan s.d. triwulan I-2018 ini lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan s.d. triwulan I-2017 yaitu Rp 6,94 triliun atau meningkat sebesar 14,27 persen.

c) PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Total penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) s.d. triwulan I-2018 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp14,44 miliar. Angka penerimaan PPnBM tersebut disumbangkan secara dominan oleh Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp9,29 miliar. Sedangkan kota-kota lain mencatatkan angka penerimaan PPnBM dengan total kurang dari Rp 1 miliar.

Grafik 2.3 Realisasi Penerimaan PPnBM Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

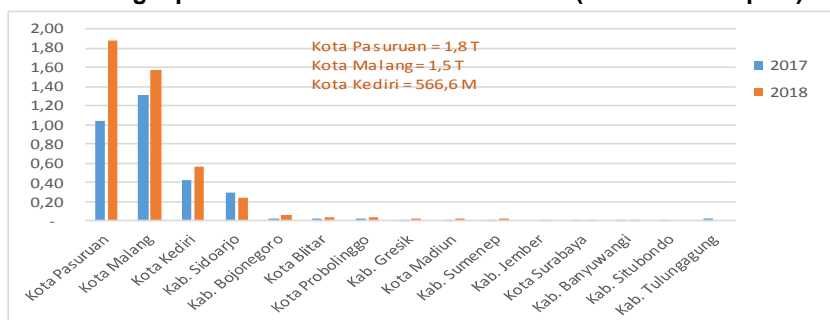


Sumber: SPAN

d) Penerimaan Cukai

Secara umum penerimaan Cukai s.d. triwulan I-2018 di Jawa Timur mengalami kenaikan yang tajam, yaitu sebesar Rp1,88 triliun, bila dibandingkan dengan penerimaan selama kurun waktu triwulan I-2017 yang sebesar Rp1,04 triliun atau meningkat sebesar 80,11 persen.

Grafik 2.4 Realisasi Penerimaan Cukai Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: SPAN

"Capaian pajak triwulan I tahun 2018 masih Rp4 triliun atau 15% dari target tahun 2018 Rp25,7 triliun. Trennya memang seperti ini, namun kami optimis bulan April dan Mei ada peningkatan capaian."

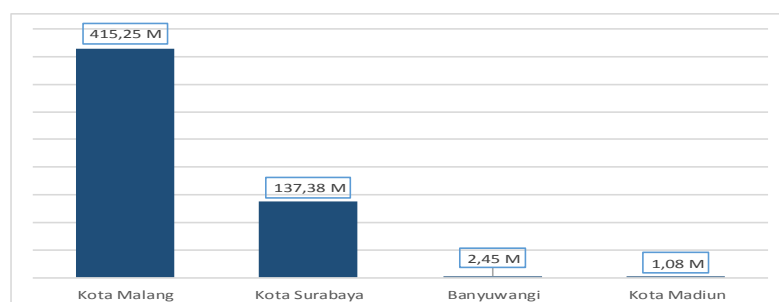
-Kepala Kanwil DJP Jatim III, Rudy Gunawan Bastari, TIMES Indonesia -

2. Penerimaan Negara BukanPajak

a) Penerimaan PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan yang dihasilkan oleh Satker Badan Layanan Umum(BLU) di Bidang Pendidikan pada triwulan I-2018 di wilayah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp556,16 miliar yang dihasilkan oleh empat Kota/Kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Madiun.

Grafik 2.5 Realisasi PNBP Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: SPAN

b) Penerimaan PNBP Pendapatan Uang Pendidikan

Grafik 2.6 Realisasi PNBP Pendapatan Uang Pendidikan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: SPAN

Pendapatan Uang Pendidikan dihasilkan oleh satker yang mengurus bidang pendidikan di lingkup provinsi Jawa Timur s.d. triwulan I-2018 adalah sebesar Rp261,16 miliar. Pendapatan ini dihasilkan oleh 11 (sebelas) kota/Kabupaten di Jawa Timur. Penerimaan tertinggi di Kabupaten Jember sebesar Rp 131,06 miliar.

"Akan ada kenaikan tarif PNBP di UPT-UPT Kemenhub yang masih terlalu murah misalnya pelabuhan, bandara dan terminal bis. Kami naikan dalam batas tertentu dan masih mungkin. Mungkin hanya sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, masih kecil."

- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, katadata.co.id -

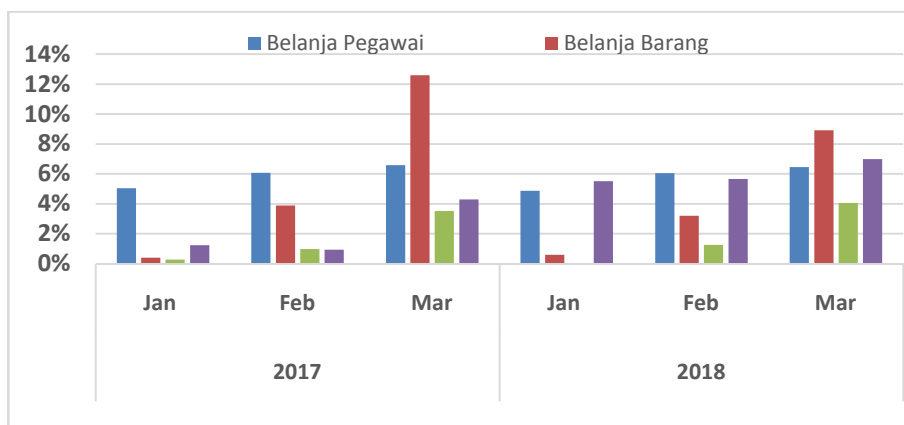
B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Total realisasi belanja pemerintah pusat s.d. triwulan I-2018 adalah sebesar Rp5,98 triliun atau 13,48 persen dari total pagu belanja Rp44,37 triliun. Tren realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada umumnya terus mengalami kenaikan hingga akhir bulan Maret 2018.

Grafik 2.7 Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2017 dan 2018

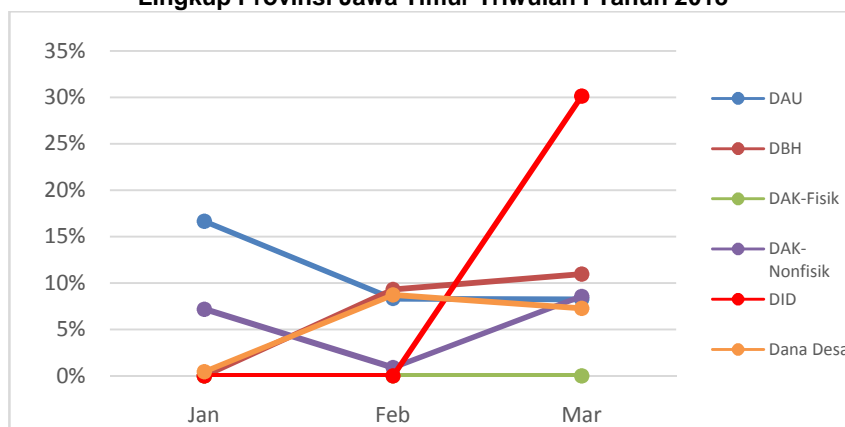


Sumber : SPAN

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pagu total Dana Transfer ke Daerah pada lingkup Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebesar Rp68,65 triliun yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik), dan Dana Insentif Daerah (DID). Sedangkan pagu total Dana Desa adalah sebesar Rp6,34 triliun. Realisasi total Dana Transfer dan Dana Desa s.d. Triwulan I-2018 sebesar Rp18,91 triliun atau 25,21 persen dari total pagu.

Grafik 2.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018



Sumber : SPAN

3. Pengelolaan BLU

Jumlah satker Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 25 Satker BLU yang tersebar dalam 5 rumpun (Pendidikan, Kesehatan, Kawasan, Pengelolaan Dana, dan Lainnya). Hingga akhir triwulan I-2018 semua satker BLU tersebut telah menghasilkan pendapatan BLU total sebesar Rp0,71 triliun.

**Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi BLU
Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2017 dan 2018**

Uraian	Triwulan I TA 2017		Triwulan I TA 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan JasaLayananUmu m	1.982.829.691.090	523.937.143.271	2.587.944.685.000	683.748.096.354
Pendapatan Hibah BLU	550.000.000	-	1.748.863.000	-
Pendapatan HasilKerjaSama BLU	159.057.206.910	12.899.320.204	165.546.376.000	17.372.964.721
Pendapatan BLU Lainnya	33.133.215.000	5.606.813.810	63.257.878.000	8.062.598.646
JumlahPenerimaan BLU	2.175.570.113.000	542.443.277.285	2.818.497.802.000	709.183.659.721

Sumber : SPAN

Pendapatan BLU sampai dengan akhir triwulan I-2018 tersebut meningkat sebesar 0,23 persen jika dibandingkan dengan total pendapatan BLU pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama, yaitu sebesar Rp0,54 triliun.

4. Manajemen Investasi Pusat

Rekonsiliasi *Outstanding* Pinjaman Pemerintah Daerah dan BUMD telah diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur pada awal 2018. Debitur yang wajib menghadiri pelaksanaan rekonsiliasi di Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur tersisa 5 Debitur dengan 6 pinjaman. Dari 5 (lima) debitur, hanya PDAM Kota Surabaya yang telah menyelesaikan pelunasan hutangnya, sedangkan 4 (empat) lainnya masih dalam proses penghapusan bersyarat dengan nilai Rp27,16 miliar.

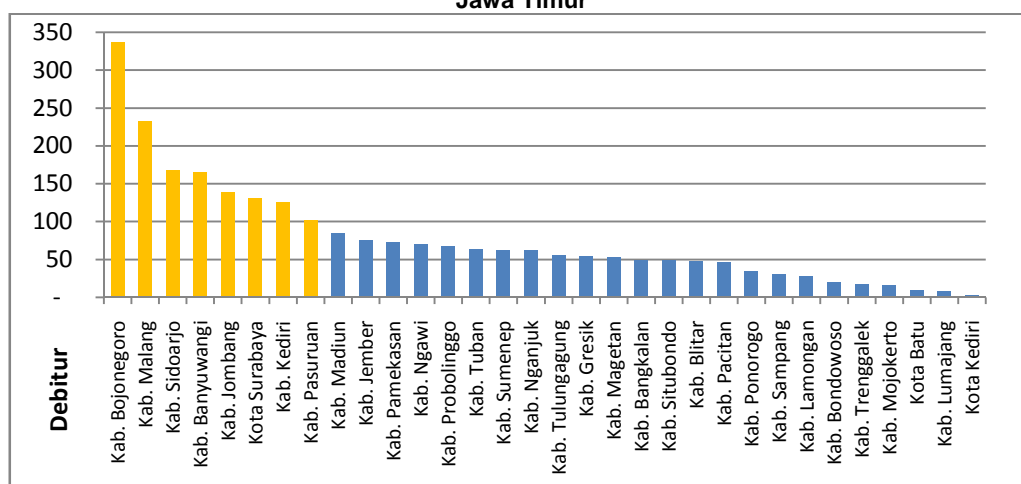
Tabel 2.2 Posisi Pinjaman Pemda dan BUMD Posisi Per 31 Desember 2017

Uraian	PEMDA		PDAM		Nilai tagih (Rp)
	Jumlah	Pinjaman	Jumlah	Pinjaman	
Lunas	0	0	1	2	-
Penghapusan Mutlak	0	0	0	0	-
Hibah non Kas	0	0	0	0	-
Proses Penghapusan Bersyarat	0	0	4	4	27,163,870,022.60
Jatuh Tempo Setiap Bulan	0	0	0	0	-
Jumlah	0	0	5	6	27,163,870,022.60

Sumber: SLIM

Bentuk lain investasi pemerintah pusat di daerah adalah pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi ini adalah suatu upaya penyaluran dana ke dalam usaha produktif di masyarakat dengan syarat yang ringan. Koordinator pendanaan UMi ini dilaksanakan oleh salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkeu, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sampai dengan akhir triwulan I 2018 terdapat 2.469 debitur UMi yang tersebar di 32 kota/kabupaten di Jawa Timur dengan total pinjaman sebesar Rp 13,94 miliar.

Grafik 2.9 Penyaluran Kredit Ultra Mikro Triwulan I Tahun 2018 Jawa Timur



Sumber : Dit.SMI

C. Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d.Triwulan I Tahun 2018

(dalam miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi Tw.I 2018		Perkiraan Realisasi s.d. Akhir 2018	
		Rp	% Thd Pagu	Rp	% Thd Pagu
Penerimaan Negara	195.596,45	22.864,64	11,69%	190.706,54	97,5
Belanja Negara	119.368,30	24.891,25	20,85%	109.221,99	91,5
Surplus/Defisit	76.228,01	(2.026,61)	-2,66%	81.484,54	106,56

Sumber : SPAN

Perkiraan realisasi pendapatan negara s.d. akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp190,71 triliun atau 97,5 persen dari pagu pendapatan yang ditetapkan Rp195,6 triliun. Faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara s.d. triwulan IV-2018 adalah bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksikan terus meningkat (*q-q*). Belanja negara juga diperkirakan akan mengalami peningkatan s.d. akhir tahun 2018 sebesar Rp109,22 triliun atau sebesar 91,5 persen. Belanja negara yang diperkirakan lebih dari 90 persen ini diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makroekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok di daerah.

**Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Jawa Timur
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Triwulan I Tahun 2017		Triwulan I Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	110.467,72	24.883,33	114.882,39	26.219,95
PAD	30.207,14	6.773,01	32.819,22	7.614,58
Pajak Daerah	19.526,45	4.384,04	21.043,84	4.766,37
Retribusi daerah	1.525,77	338,86	1.471,66	317,14
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	809,41	494,92	823,38	509,67
Lain-lain PAD yang sah	8.345,50	1.555,19	9.480,34	2.021,40
Pendapatan Transfer	78.824,62	17.959,58	79.283,78	18.463,54
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	66.758,33	16.713,11	66.348,57	16.182,26
Dana Bagi Hasil Pajak	6.998,00	1.692,15	6.468,29	1.387,69
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2.296,06	388,29	947,71	212,24
Dana Alokasi Umum	39.049,24	11.701,07	39.994,65	12.316,21
Dana Alokasi Khusus	18.415,03	2.931,59	18.937,92	2.266,12
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.659,58	396,49	7.034,19	1.116,07
Dana Otonomi Khusus	1.004,64	29,35	349,83	34,02
Dana Intensif Daerah	59,54	33,52	119,50	59,75
Dana Penyesuaian	4.799,63	333,62	5.836,15	938,31
Dana Desa	795,77	-	728,71	83,99
Transfer Pemerintah Provinsi	5.038,32	848,63	5.405,42	1.098,45
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.838,99	848,58	5.394,46	1.098,02
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	199,34	0,06	10,96	0,42
Transfer Bantuan Keuangan	368,39	1,35	495,60	66,76
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	1.435,97	150,74	2.779,39	141,83
Pendapatan Hibah	297,83	7,25	2.329,72	6,93
Pendapatan Dana Darurat	244,25	-	238,57	47,69
Pendapatan Lainnya	893,89	143,50	211,10	87,21
BELANJA	104.626,65	9.821,80	111.466,44	13.086,21
Belanja Pegawai	43.181,15	6.098,90	44.480,71	6.435,70
Belanja Barang	24.815,77	2.327,21	28.055,16	2.815,98
Belanja Bunga	7,23	2,19	7,89	1,80
Belanja Subsidi	20,95	0,04	88,98	1,24
Belanja Hibah	9.330,34	1.021,20	10.773,83	2.648,48
Belanja Bantuan sosial	485,43	14,85	596,76	36,43
Belanja Bantuan Keuangan	6.067,36	126,38	7.713,15	642,49
Belanja Modal	20.390,21	192,51	19.500,14	466,76
Belanja Tidak Terduga	328,20	38,52	249,82	37,33
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	11.292,21	1.277,13	9.944,58	1.544,92
Transfer/Bagi Hasil Kedesa	6.536,28	1.220,25	6.821,63	1.362,91
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.566,48	1.219,78	5.892,94	1.138,55
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	969,80	0,47	928,70	224,35
Transfer Bantuan Keuangan	4.755,94	56,88	3.122,94	182,01
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	924,55	21,38	74,63	0,68
Transfer Dana Desa	812,29	-	344,95	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	3.019,10	35,50	2.703,36	181,34
Belanja dan Transfer	115.918,87	11.098,93	121.411,01	14.631,13
Surplus / Defisit	(5.451,14)	13.784,40	(6.528,62)	11.588,81

Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4 persen atau sebesar Rp121,42 triliun. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp26,22 triliun atau sebesar 22,9 persen

dari pagu, dengan penyumbang terbesar dari pendapatan transfer, yaitu sebesar 79,29 triliun atau sebesar 69,01 persen dari pagu pendapatan. Sedangkan pagu Belanja Daerah tahun 2018 Rp111,47 triliun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp104,63 triliun. Realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan I tahun 2018 juga mengalami kenaikan, yaitu Rp 13,09 triliun, bila dibandingkan dengan belanja daerah pada triwulan I tahun 2017 yang sebesar Rp9,83 triliun. Sampai dengan triwulan I tahun 2018 APBD lingkup Provinsi Jawa Timur mengalami defisit sebesar Rp6,53 triliun.

A. Pendapatan Daerah

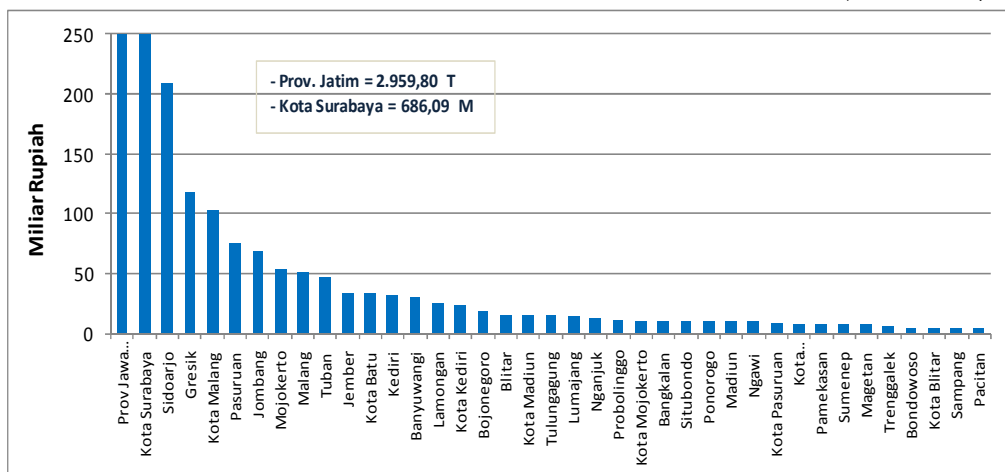
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Meliputi PAD agregat seluruh Pemda Jawa Timur berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur, d Triwulan I Tahun 2018

(dalam Miliar Rupiah)



Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

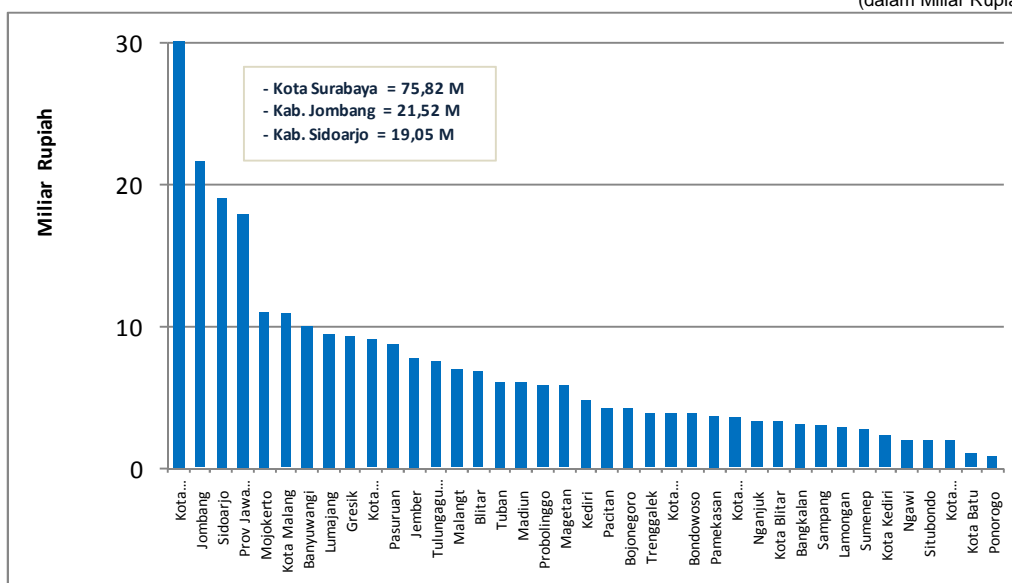
Jumlah pajak daerah Jawa Timur periode Triwulan I tahun 2018 sebanyak Rp4,77 triliun atau 22,65 persen dari perkiraan targetnya sebesar Rp21,04 triliun dan mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2017 (y-y) yaitu dengan perolehan sebanyak Rp4,38 Triliun.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah lingkup Provinsi Jawa Timur per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018

(dalam Miliar Rupiah)



Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

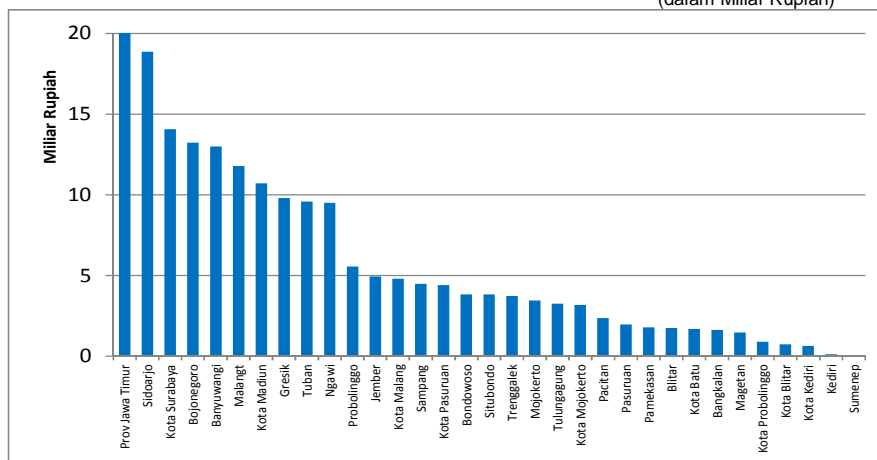
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah di Jawa Timur hingga periode Triwulan I tahun 2018 tercatat sebanyak Rp317,14miliar. Jumlah tersebut mencapai 6,99 persen dari target penerimaan pada APBD sebesar Rp1,48 triliun. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah Kota Surabaya sebesar Rp75,82 miliar.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi Jawa Timur per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Grafik3.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018

(dalam Miliar Rupiah)



Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

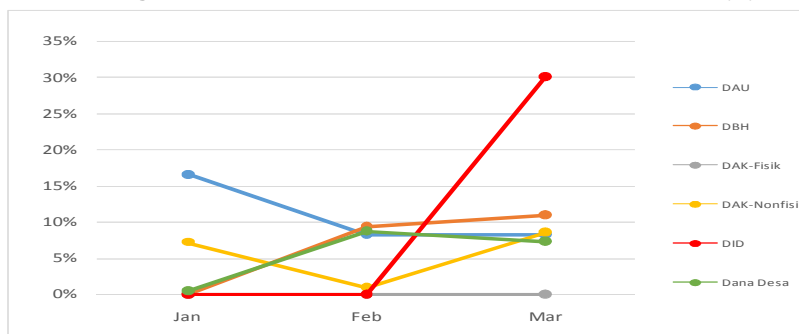
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang masuk ke Kas daerah di Jawa Timur berjumlah Rp509,67 miliar atau 61,9 persen dari target sebesar Rp823,39 miliar. Penyumbang terbesar untuk triwulan I tahun 2018 adalah Pemerintah Provinsi yang mencapai Rp338,56 miliar atau 66,43 persen dari total penerimaan.

“Pada 2018 Bapenda Jatim ditarget bisa mengumpulkan PAD sebanyak Rp12,75 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan 2017 karena merupakan APBD murni. PAD tersebut bisa melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor”
 - Irwan Setiawan, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Radar Surabaya-

2. Pendapatan Transfer

Meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Grafik 3.4 PagudanRealisasiPenyerapan Dana Transfer LingkupProvinsiJawaTimurTriwulan I Tahun2017-2018(y-y)



Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

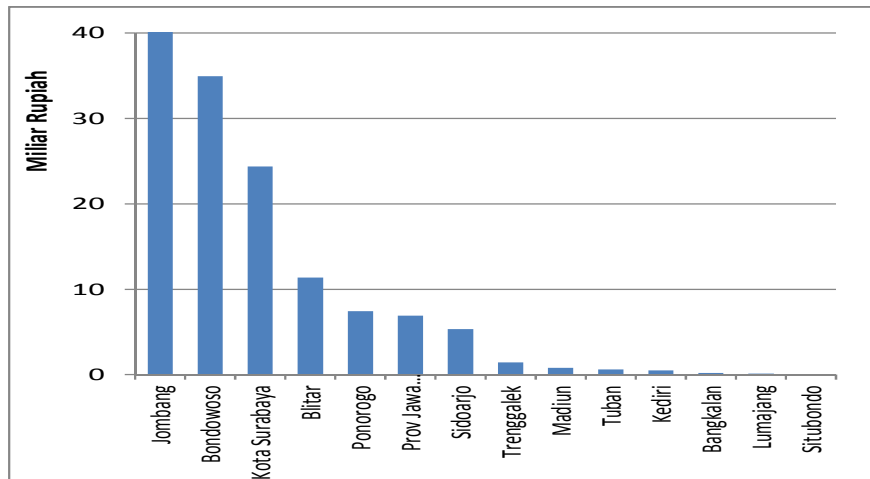
Pagu transfer DAU untuk tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar Rp99,92 triliun dibandingkan pagu 2017 yang sebesar Rp39,83 triliun. Pagu Transfer DAK Fisik mengalami penurunan dari Rp5,01 triliun di tahun 2017 menjadi Rp3,77 triliun di tahun 2018, salah satu penyebabnya adalah Pemerintah Kota Madiun tidak mendapat penyaluran DAK Fisik. Realisasi pendapatan transfer DAU di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dari Rp13,39 triliun menjadi Rp13,27 triliun. Realisasi transfer DBH untuk triwulan I tahun 2018, sebesar Rp1,67 triliun menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp2,27 triliun.

“Dana Desa harus dioptimalkan. Dengan Begitu, warga desa bisa merasakan manfaatnya dan pengelolaan dana jauh dari penyelewengan”
 - Bambang Soesatyo, Ketua DPRRI, Jawa Pos-

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada seluruh Pemerintah Daerah Jawa Timur (provinsi/kabupaten/kota) berupa pendapatan hibah dan pendapatan lainnya.

Grafik 3.5 Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Lingkup Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2017-2018 (y-y)

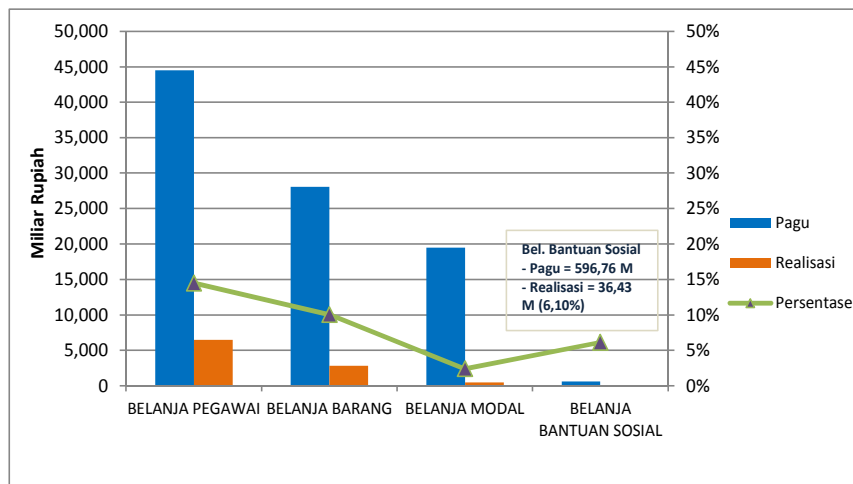


Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3.6 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018



Sumber :BPKAD Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Timur

Alokasi untuk Belanja Pegawai oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur masih mendominasi pagu belanja pada APBD tahun 2018. Dengan nilai pagu sebesar Rp44,49 triliun, sampai dengan Triwulan I realisasi belanja adalah Rp6,44 triliun atau 14,47 persen dari pagu. Hingga akhir Triwulan I tercatat capaian realisasi

Belanja Barang sebesar 10,04 persen dan Belanja Modal 2,39 persen dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 6,10 persen dari total pagu tiap jenis belanja.

C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Akhir Tahun 2018

Hasil perkiraan pendapatan daerah dan belanja daerah Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai kebijakan fiskal diantaranya kebijakan yang tetap memprioritaskan transfer ke daerah dan Dana Desa, DAK akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dan prioritas nasional.

**Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD
Lingkup Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan IV Tahun 2017**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Tw. I Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d Tw. IV Tahun 2018	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	114.882,39	26.219,95	22,82%	116.031,21	101%
Belanja Daerah	121.411,01	14.631,13	12,05%	127.481,56	105%
Surplus / Defisit	(6.528,62)	11.588,81	10,77%	(11.450,35)	-4,00%

Sumber :LRA, BPKAD Pemprov Jatim

BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Pada tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) Tingkat Wilayah yang mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	41,773,257,224,432	8,025,449,844,130	49,798,707,068,562	80.72%	27,555,396,000,249
Pendapatan Perpajakan	21,077,345,269,100	4,799,491,394,191	25,876,836,663,291	16.22%	22,265,819,224,731
Pendapatan Bukan Pajak	20,695,911,955,332	2,880,393,875,188	23,576,305,830,520	348.46%	5,257,176,535,834
Hibah	-	182,121,378,296	182,121,378,296	534.88%	28,685,739,684
Transfer	-	163,443,196,454	163,443,196,454	0.00%	3,714,500,000
Belanja Negara	5,981,725,670,540	14,181,055,253,264	20,162,780,923,804	5.56%	19,101,506,274,027
Belanja Pemerintah	5,981,725,670,540	13,461,729,577,857	19,443,455,248,397	8.94%	17,848,212,960,246
Transfer	0	719,325,675,407	719,325,675,407	-42.61%	1,253,293,313,781
Surplus / (Defisit)	35,791,531,553,892	(6,155,605,409,135)	29,635,926,144,757	250.56%	8,453,889,726,222
Pembiayaan	-	5,031,905,786,471	5,031,905,786,471	23.70%	4,067,706,168,162
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	5,282,312,882,980	5,282,312,882,980	27.63%	4,138,859,818,570
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	250,407,096,509	250,407,096,509	251.92%	71,153,650,408
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Angga	35,791,531,553,892	(1,123,699,622,664)	34,667,831,931,228	176.86%	12,521,595,894,384

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Realisasi Pendapatan Negara konsolidasi sampai dengan triwulan I tahun 2018, mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp27,56 triliun menjadi Rp49,80 triliun di tahun 2018 atau meningkat 80,72 persen. Kenaikan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Bukan Pajak senilai Rp23,58 triliun, meningkat sangat signifikan sebesar Rp18,32 triliun dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp5,26 triliun. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara konsolidasi 2018 mengalami kenaikan 5,56 persen dari Rp19,10 triliun di tahun 2017 menjadi Rp20,17 triliun. Di tahun 2018 mengalami surplus anggaran sebesar Rp29,64 miliar sedangkan di tahun 2017 surplus sebesar Rp8,45 miliar. Pembiayaan untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari Rp4,06 triliun di tahun 2017 menjadi Rp5,29 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 23,70 persen.

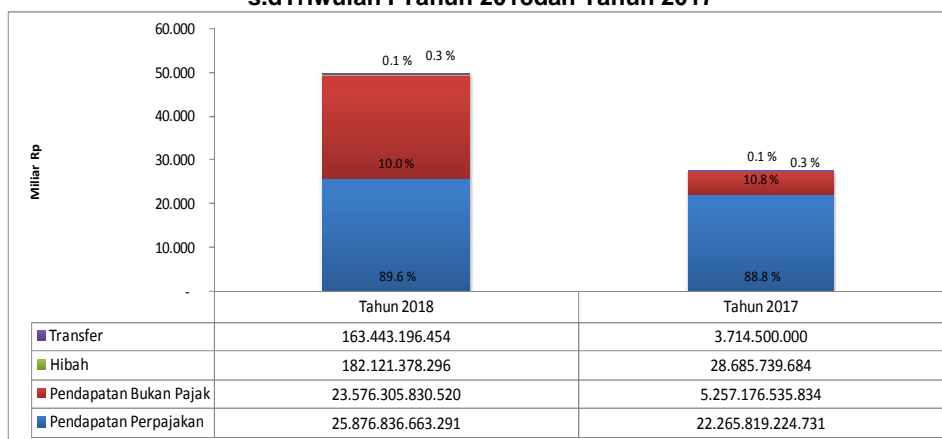
B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Negara Konsolidasian di Wilayah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp49,80 triliun atau mengalami kenaikan

dibanding tahun 2017 sebesar Rp27,56 triliun yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

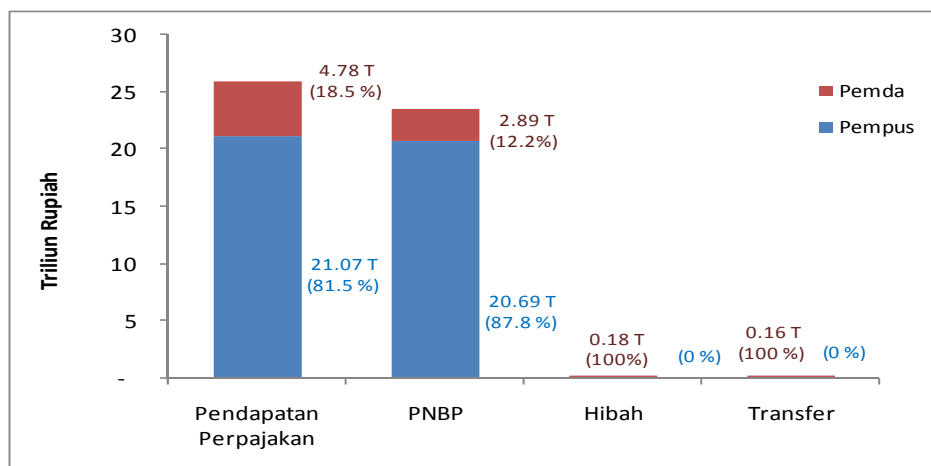
Grafik 4.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018 dan Tahun 2017



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pada Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2018, porsi terbesar berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp21,07 triliun atau sebesar 81,5 persen dari total pendapatan perpajakan yang sebesar Rp25,88 triliun. Pendapatan Bukan Pajak menyumbang sebesar Rp20,70 triliun atau sebesar 87,8 persen dari total PNB. Sedangkan untuk Pendapatan Hibah dan transfer seluruhnya merupakan berkontribusi Pemerintah Daerah.

Grafik 4.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018



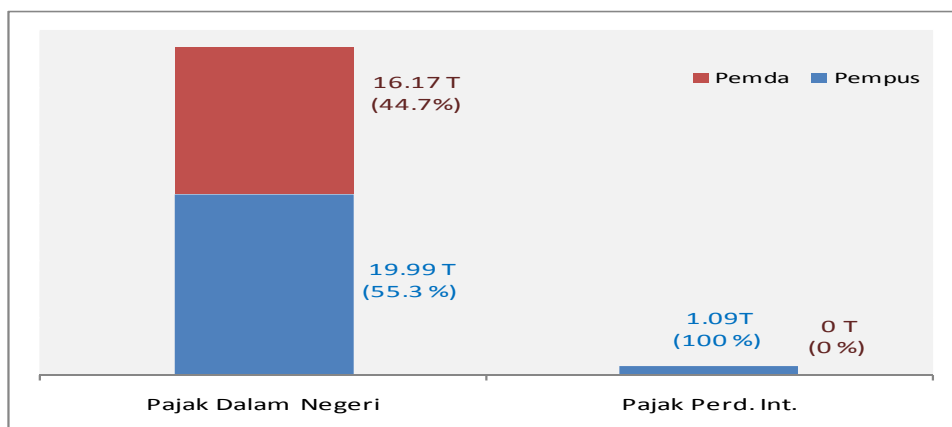
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pada Struktur Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2018, Pendapatan Pemerintah Pusat mendominasi setiap jenis pendapatan negara yaitu Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bukan Pajak

dan Hibah. Dari total Pendapatan Perpajakan Konsolidasian tahun 2018 sebesar Rp49,80 triliun, porsi pendapatan Pemerintah Pusat mencapai 83,8 persen atau sebesar Rp41,78 triliun sedangkan pendapatan Pemerintah Daerah sebesar 16,2 persen atau sebesar Rp8,03 triliun.

2. Analisis Perubahan

Grafik 4.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur s.d Triwulan I Tahun 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Pemerintah Pusat masih mendominasi penerimaan jenis Pajak Dalam Negeri yang mencapai 55,3 persen atau sebesar Rp19,99 triliun sedangkan pemerintah daerah memberikan kontribusi sebesar 44,7 persen atau sebesar Rp 16,17 triliun. Untuk Pajak Perdagangan Internasional seluruhnya merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,08 triliun. Dari total Pendapatan Perpajakan sebesar Rp37,24 triliun, porsi Pajak Perdagangan Internasional sebesar 2.92 persen sedangkan pajak Dalam Negeri berkontribusi sangat besar yaitu 97,08 persen.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dan Tahun 2017

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	22.265.819.224.731	142956,70%	25.876.836.663.291	807,35%
PNBP	5.257.176.535.834	668,75%	23.576.305.830.520	57,72%
Total	27.522.995.760.565	1782,42%	49.453.142.493.812	503,61%
PDRB /Pert. Ekonomi	480,36T	5,37%	523,82T	5,50%

Sumber : LRA, BPKAD

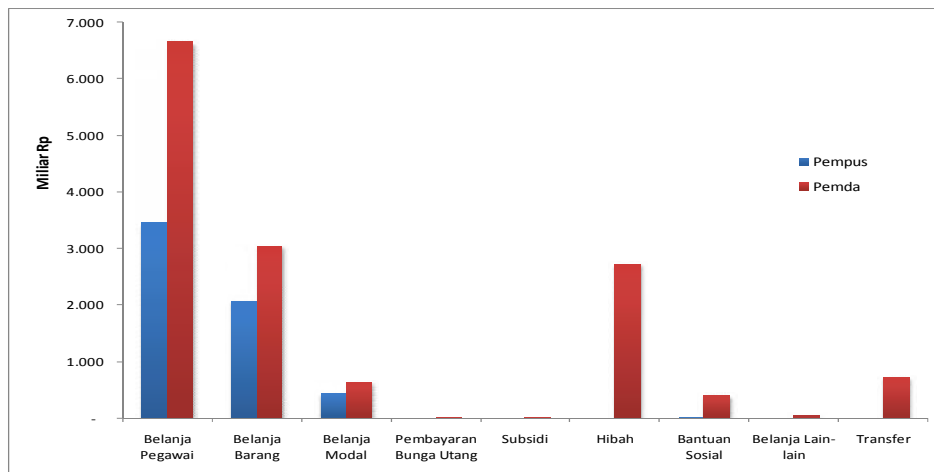
Kenaikan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 807,35 persen memberikan dampak kenaikan terhadap PDRB. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp523,82 triliun naik sebesar 5,5 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp480,36 triliun.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal, yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi permintaan agregat untuk selanjutnya diharapkan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.

Grafik 4.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



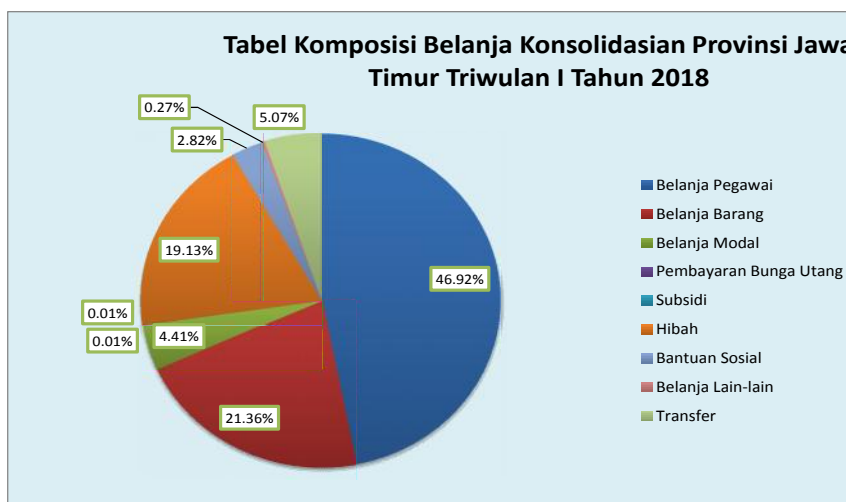
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Jatim

Seluruh jenis belanja, porsi pengeluaran Pemerintah Daerah melebihi porsi pengeluaran Pemerintah Pusat. Untuk belanja pegawai, porsi pengeluaran Pemerintah Daerah sebesar 65,76 persen melebihi porsi pengeluaran Pemerintah Pusat yang sebesar 34,24 persen. Untuk belanja barang, porsi pengeluaran Pemerintah Daerah sebesar 59,35 persen lebih besar dibanding Pemerintah Pusat yang sebesar 40,65 persen. Belanja modal, porsi Pemerintah Daerah sebesar 59,09 persen sedangkan Pemerintah Pusat 40,91 persen. Belanja bantuan sosial, porsi Pemerintah Daerah 97,8 persen sedangkan Pemerintah Pusat hanya 2,2 persen. Sedangkan untuk belanja pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, belanja lain-lain dan transfer porsi belanja Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.

2. Analisis Perubahan

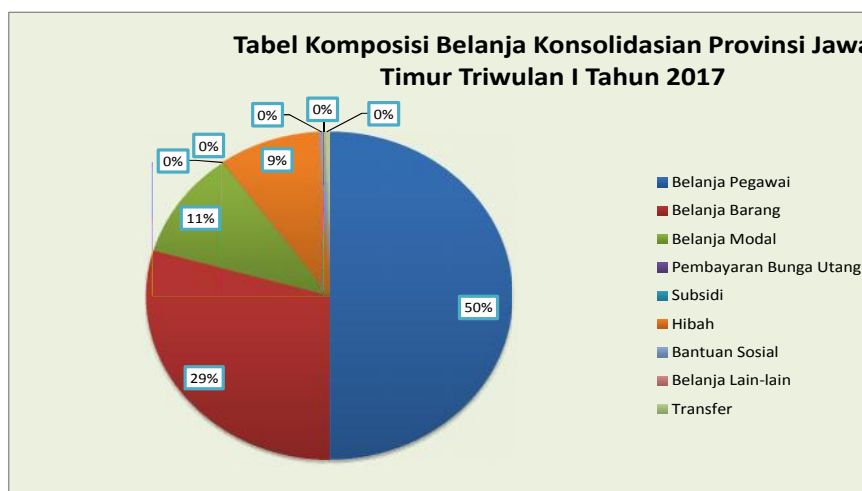
Menurut klasifikasi ekonomi, belanja pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Grafik 4.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018



Sumber: GFS Prov. Jatim

Grafik 4.6 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2017



Sumber: GFS Prov. Jatim

Porsi terbesar pada komposisi belanja konsolidasian Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2018 adalah belanja pegawai sebesar 46,92 persen lebih kecil dibanding periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 50 persen. Belanja barang sebesar 21 persen lebih kecil dibanding tahun 2017 sebesar 29 persen. Sedangkan untuk belanja modal 4,4 persen lebih rendah dibanding tahun 2017 yang sebesar 11 persen.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan Fiskal pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam alokasi anggaran dimaksudkan untuk mempengaruhi perekonomian, dalam hal ini untuk mempengaruhi permintaan agregat dan redistribusi pertumbuhan. Sektor konsumtif merupakan belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai

kebutuhan operasional pemerintah yang sifatnya rutin dan habis pakai yang *multiplier effect*-nya bersifat jangka pendek. Sedangkan sektor produktif merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk investasi mendanai kegiatan dalam rangka membentuk aset yang diharapkan menimbulkan *multiplier effect* yang berkelanjutan yang bersifat langsung dan tidak langsung. Agar pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, perlu adanya kebijakan fiskal untuk meningkatkan porsi belanja modal.

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. Judul Isu Fiskal Regional I

Prospek Ekonomi Jatim Membaik, Kondusif untuk Investasi

Surabaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Herawanto, Rabu (28/2), mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur di tahun 2018 diperkirakan mencapai 5,4% sampai 5,8% (yoy), hal ini menandakan perkembangan yang membaik dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 yang tercatat tumbuh sebesar 5.4% (yoy). Karena itu prospek ekonomi Provinsi Jawa Timur yang membaik sangat kondusif untuk investasi. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2018 diyakini masih tumbuh positif dan ditopang oleh konsumsi swasta di sisi permintaan, lapangan usaha di sisi penawaran. Tiga sektor potensial yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yaitu: industri pengolahan ikan dan biota laut, industri galangan kapal, dan industri pariwisata.

Target di tahun 2018 ini, PMA mencapai Rp80 triliun, sedangkan PMDN mencapai Rp50 triliun. Sedangkan di tahun 2017 lalu target PMA dan PMDN gabungan Rp50 triliun.

Radarsidoarjo.com – Kamis, 1 Maret 2018

B. Judul Isu Fiskal Regional I

JATAH DANA DESA BERKURANG

Sidoarjo, Total Dana Desa yang diterima 322 desa di Kabupaten Sidoarjo pada 2018 ini berkurang. Tahun ini total anggaran yang diterima Rp252 miliar. Pada 2017, total dana desa Rp264 miliar. Artinya berkurang Rp12 miliar. Menurut Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana

(PDMDP3AKB) Pemkab Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, anggaran Dana Desa tahun 2018 ini berkurang karena angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo ini rendah. Probo mengatakan bahwa pemerintah memiliki rumusan persentase pembagian Dana Desa, yakni 90% dibagi rata seluruh desa, sementara 10% dibagikan kepada desa yang angka kemiskinannya tinggi. Sedangkan tahun ini ada perubahan yakni 70% dibagi rata seluruh desa dan sisanya 30% untuk desa-desa yang masih memiliki kekurangan, misalnya angka kemiskinannya tinggi.

Agar dana yang diberikan kedesa tersebut tepat sasaran, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat skala prioritas penggunaan anggaran tersebut. Pertama dana tersebut harus digunakan untuk membangun embung yang berfungsi untuk menampung air di musim hujan sehingga pada musim kemarau masih ada cadangan air dan sawah tidak mengalami kekeringan.

Jawa Pos- Senin, 12 Maret 2018